

Evaluasi Kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026

Sri Winarsi Zulkarnain^{1*}, Dewi Permatasari², Jufri Jacob³

1-3 Program Studi Magister Ilmu Ekonomi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Khairun, Indonesia

E-mail: nharsi1991@gmail.com¹, dewi.permatasari@unkhair.ac.id², jufri_irti@yahoo.co.id³

Article History:

Received: 21 Juli 2026

Revised: 19 Agustus 2026

Accepted: 03 September 2026

Keywords: *Evaluasi Kinerja; Kebijakan Publik; MICMAC; Pembangunan Daerah; RPJMD*

Abstrak: Penelitian ini mengevaluasi kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026, menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan, dan memetakan faktor strategis yang memengaruhinya. Penelitian memakai pendekatan kualitatif deskriptif-evaluatif dengan studi kasus, telaah dokumen, observasi terbatas, data fiskal, serta penilaian 11 ahli. Analisis menggunakan enam kriteria William N. Dunn dan MICMAC. Hasil menunjukkan bahwa mekanisme evaluasi telah tersedia, tetapi keterlacakan indikator, program, anggaran, dan tindak lanjut belum seragam. IPM, pertumbuhan ekonomi, dan PDRB per kapita tahun 2024 telah melampaui target akhir. Kemiskinan belum mencapai target, sedangkan lima indikator strategis belum dapat dinilai. Realisasi pendapatan dan belanja mencapai 95,81 persen dan 94,57 persen, tetapi kualitas hasil belum sepenuhnya terlacak. MICMAC menempatkan komitmen pimpinan dan kualitas aparatur sebagai penggerak, sedangkan koordinasi, konsistensi perencanaan-penganggaran, serta sistem pemantauan menjadi penghubung. Kinerja RPJMD tergolong berhasil secara parsial. Perbaikan perlu diarahkan pada satu data, penandaan anggaran, pemerataan layanan antarpulau, dan tindak lanjut berbasis hasil.

PENDAHULUAN

Pembangunan daerah merupakan proses untuk mengubah kondisi sosial, ekonomi, pelayanan, infrastruktur, dan tata kelola secara terencana. Keberhasilannya tidak cukup dinilai dari jumlah kegiatan atau besarnya anggaran. Pemerintah harus menunjukkan hubungan yang jelas antara masalah, sasaran, program, keluaran, hasil, dan manfaat yang diterima masyarakat. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah menjadi instrumen utama untuk menjaga hubungan tersebut selama satu periode kepemimpinan.

RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026 memuat visi, misi, tujuan, sasaran, indikator, program, dan kerangka pendanaan. Dokumen ini dijabarkan ke dalam RKPD,

Renstra perangkat daerah, Renja perangkat daerah, KUA-PPAS, APBD, serta laporan kinerja. Konsistensi antardokumen menentukan peluang tercapainya sasaran. Ketika program atau anggaran tidak dapat ditelusuri kembali ke sasaran RPJMD, evaluasi akan berhenti pada pelaporan administratif dan tidak menghasilkan pembelajaran kebijakan.

Evaluasi kinerja dibutuhkan untuk membandingkan target dan realisasi, mengidentifikasi kesenjangan, menjelaskan penyebab, dan menetapkan tindakan korektif. Dunn (2018) menawarkan enam kriteria yang relevan, yaitu efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Kerangka ini mencegah penilaian yang hanya bertumpu pada serapan anggaran. Program dapat selesai dan menyerap anggaran tinggi, tetapi belum tentu cukup menyelesaikan masalah, merata antarkelompok, atau tepat menjangkau wilayah sasaran.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kualitas RPJMD dipengaruhi oleh kapasitas aparatur, konsistensi dokumen, dukungan anggaran, koordinasi, kualitas data, dan kepemimpinan. Siregar et al. (2022) menemukan hambatan pada sumber daya manusia, sinkronisasi, efisiensi, dan efektivitas program. Tarore et al. (2023) menegaskan masalah kedisiplinan data dan keterbatasan kapasitas penyusun. Ginting et al. (2024) menunjukkan bahwa inkonsistensi kegiatan dan deviasi anggaran melemahkan pencapaian pembangunan.

Kabupaten Halmahera Selatan memiliki konteks kepulauan yang kuat. Wilayah laut mencapai sekitar 78 persen dan penduduk tersebar pada 30 kecamatan. Jarak antarpulau, ketergantungan pada cuaca, biaya transportasi, dan variasi akses meningkatkan biaya pelayanan dan pemantauan. Kondisi ini menuntut indikator yang mampu membaca pemerataan wilayah. Capaian rata-rata kabupaten dapat menutupi kesenjangan layanan pada pulau kecil dan kecamatan terpencil. Nenobais et al. (2025) menegaskan bahwa evaluasi kebijakan pada wilayah kepulauan harus menghubungkan target, kapasitas pelaksana, dan karakter spasial.

Data awal memperlihatkan capaian yang tidak seragam. Pada tahun 2024, Indeks Pembangunan Manusia mencapai 68,43, lebih tinggi daripada target akhir 67. Pertumbuhan ekonomi mencapai 23,95 persen dibandingkan target 13,50 persen. PDRB per kapita mencapai Rp79,45 juta dibandingkan target Rp55,42 juta. Sebaliknya, persentase penduduk miskin masih 5,63 persen, lebih tinggi daripada target 4,00 persen. Lima indikator strategis lain belum dapat dinilai karena realisasi yang sesuai belum tersedia secara memadai.

Perbedaan tersebut menimbulkan dua masalah. Masalah pertama berkaitan dengan kualitas hasil pembangunan. Pertumbuhan ekonomi yang tinggi belum otomatis menurunkan kemiskinan atau menjamin pemerataan manfaat. Masalah kedua berkaitan dengan mutu sistem evaluasi. Indikator tanpa definisi, kondisi awal, sumber data, jadwal pemutakhiran, dan penanggung jawab tidak dapat digunakan untuk mengendalikan kebijakan secara kredibel.

Kajian sebelumnya lebih banyak menilai satu sektor, satu perangkat daerah, atau proses penyusunan dokumen. Penelitian ini menggabungkan analisis target-realisasi, enam kriteria evaluasi, bukti fiskal, analisis tematik, pemetaan aktor, dan MICMAC. Integrasi tersebut memberi posisi yang lebih jelas bagi faktor penggerak, faktor penghubung, faktor hasil, dan faktor pendukung dalam sistem evaluasi RPJMD.

Penelitian bertujuan mengevaluasi mekanisme dan hasil kinerja RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026, menilai tingkat keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan, serta mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat. Hasilnya diharapkan menjadi dasar untuk memperbaiki pengendalian sisa periode, menyusun laporan akhir yang lebih dapat dipertanggungjawabkan, dan menyiapkan dokumen pembangunan periode berikutnya.

LANDASAN TEORI

RPJMD dan Manajemen Kinerja Pembangunan Daerah

RPJMD merupakan penjabaran visi dan misi kepala daerah ke dalam tujuan, sasaran, strategi, program, indikator, dan pendanaan selama lima tahun. Kedudukannya bersifat hukum, manajerial, politis, dan akuntabilitas. Fungsi manajerial terlihat pada kemampuannya mengarahkan program tahunan. Fungsi akuntabilitas terlihat pada penggunaan target sebagai dasar penilaian kinerja. Rahayu et al. (2024) menunjukkan bahwa evaluasi rencana jangka panjang perlu membaca capaian lintas periode dan faktor yang menjelaskan kesenjangan.

Kinerja RPJMD mencakup kualitas dokumen, kualitas implementasi, dan hasil pembangunan. Kualitas dokumen ditentukan oleh logika hubungan masalah, sasaran, program, indikator, dan pendanaan. Kualitas implementasi ditentukan oleh waktu, biaya, koordinasi, mutu keluaran, serta tindak lanjut. Hasil pembangunan terlihat pada perubahan indikator dan manfaat. Nurlaela et al. (2024) menegaskan bahwa penilaian indikator harus dilakukan per sektor agar rata-rata tidak menutupi kesenjangan kinerja.

Kriteria Evaluasi William N. Dunn

Efektivitas menilai pencapaian tujuan. Efisiensi menilai hubungan sumber daya dengan hasil. Kecukupan menilai kemampuan hasil menyelesaikan masalah. Pemerataan menilai distribusi manfaat dan beban. Responsivitas menilai kesesuaian kebijakan dengan kebutuhan masyarakat. Ketepatan menilai kelayakan tujuan, sasaran, instrumen, lokasi, dan kelompok penerima manfaat. Keenam kriteria saling melengkapi dan tidak dapat diganti oleh satu skor agregat.

Penerapan kerangka Dunn pada kebijakan daerah telah digunakan untuk menilai program dan dokumen pembangunan. Sultoni et al. (2024) menunjukkan bahwa program yang tampak berjalan baik tetap membutuhkan koreksi pada biaya, kelompok sasaran, dan ketepatan waktu. Kerangka ini sesuai bagi Halmahera Selatan karena hasil pembangunan perlu dibaca bersama pemerataan antarpulau dan respons terhadap kebutuhan masyarakat.

Konsistensi Perencanaan, Anggaran, Data, dan Tata Kelola

Konsistensi perencanaan dan penganggaran berarti program, kegiatan, indikator, target, lokasi, dan alokasi dapat ditelusuri dari RPJMD sampai APBD. Konsistensi tidak berarti seluruh nilai harus tetap sama. Perubahan dapat diterima apabila memiliki alasan fiskal atau kebijakan yang jelas serta tidak menghilangkan kontribusi terhadap sasaran. Wijayanti et al. (2025) menekankan pentingnya kesesuaian dokumen untuk menjaga akuntabilitas.

Data menjadi prasyarat evaluasi. Data harus memiliki definisi, satuan, periode, sumber, tingkat keterpilahan, dan mekanisme verifikasi. Khaerah et al. (2025) menunjukkan bahwa digitalisasi perencanaan dan anggaran dapat memperkuat tata kelola, tetapi hasilnya tetap bergantung pada kolaborasi dan kualitas institusi. Teknologi tidak dapat menggantikan disiplin pemutakhiran data dan tanggung jawab perangkat daerah.

Kapasitas aparatur, koordinasi, kepemimpinan, regulasi, dan anggaran bekerja sebagai satu sistem. Kamaru (2025) menunjukkan bahwa kapasitas operasional kebijakan dipengaruhi oleh sumber daya manusia, infrastruktur, dan anggaran. Auliansyah (2024) juga menempatkan pengembangan SDM, tata kelola, pelayanan, dan teknologi sebagai fondasi reformasi birokrasi.

Analisis Struktural MICMAC

MICMAC memetakan variabel berdasarkan daya pengaruh dan ketergantungan. Variabel penggerak memiliki pengaruh tinggi dan ketergantungan rendah. Variabel penghubung memiliki pengaruh serta ketergantungan tinggi. Variabel bergantung lebih banyak menjadi hasil. Variabel

otonom memiliki hubungan langsung yang relatif lebih rendah. Pemetaan membantu menentukan urutan intervensi pada sistem yang kompleks.

Dalam evaluasi RPJMD, MICMAC tidak digunakan untuk membuktikan hubungan sebab-akibat statistik. Skor berasal dari penilaian ahli dan digunakan untuk mengorganisasikan hubungan struktural. Hasil langsung dan tidak langsung dibaca bersama analisis dokumen, temuan tematik, dan konteks kebijakan.

METODE PENELITIAN

Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain deskriptif-evaluatif dan strategi studi kasus. Kasus penelitian adalah RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026. Batas kasus mencakup target, indikator, program, dokumen tahunan, anggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan tindak lanjut. Data realisasi yang dinilai terutama sampai tahun 2024. Tahun 2025 dan 2026 diposisikan sebagai periode berjalan dan target akhir.

Data sekunder meliputi RPJMD, RKPD, Renstra dan Renja perangkat daerah, laporan kinerja, pertanggungjawaban APBD, publikasi statistik, serta laporan MICMAC. Data primer yang dapat ditelusuri berupa rekapitulasi penilaian 11 responden ahli dari Bappelitbangda atau Bapperida, perguruan tinggi, BPKAD, dan Inspektorat. Rata-rata pengalaman responden sekitar sembilan tahun dengan rentang tiga sampai enam belas tahun.

Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, observasi terbatas, klarifikasi, dan penilaian ahli. Wawancara digunakan secara semi-terstruktur dalam rancangan penelitian. Berkas yang tersedia tidak memuat transkrip verbatim, sehingga artikel tidak menggunakan kutipan langsung. Tema primer disajikan sebagai sintesis rekapitulasi responden dan diperiksa dengan dokumen resmi.

Analisis target-realisis dilakukan pada indikator yang mempunyai definisi dan sumber yang dapat ditelusuri. Indikator dengan data belum tersedia diberi status belum dapat dinilai. Analisis enam kriteria Dunn digunakan untuk menilai efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, dan ketepatan. Analisis tematik digunakan untuk mengelompokkan faktor kepemimpinan, aparatur, koordinasi, data, anggaran, regulasi, partisipasi, aksesibilitas, indikator, konsistensi, sistem pemantauan, dan efektivitas program.

Matriks MICMAC menggunakan 12 variabel dan skala hubungan 0 sampai 3. Nilai nol menunjukkan tidak ada pengaruh, nilai satu lemah, nilai dua sedang, dan nilai tiga kuat. Ambang klasifikasi langsung ditetapkan pada rata-rata pengaruh dan ketergantungan sebesar 21,33. Hasil langsung dan tidak langsung digunakan untuk membedakan variabel penggerak, penghubung, bergantung, dan otonom.

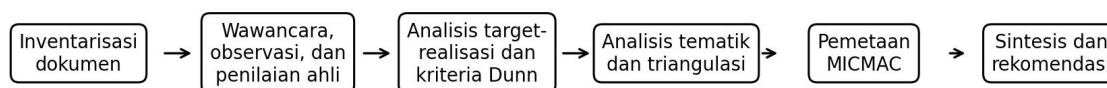
Keabsahan hasil dijaga melalui triangulasi dokumen, data statistik, data fiskal, penilaian ahli, dan laporan analisis struktural. Penelitian juga mencatat keterbatasan data, perbedaan sumber, dan status indikator. Prinsip ini sejalan dengan Ahmed (2024), Braun dan Clarke (2022), Byrne (2022), serta Naeem et al. (2023) yang menekankan keterlacakan, reflektivitas, dan konsistensi proses analisis kualitatif.

Tabel 1. Fokus dan Teknik Analisis Penelitian

Fokus	Bukti utama	Teknik analisis	Keluaran
Mekanisme evaluasi	RPJMD, RKPD, Renstra, Renja, APBD, laporan kinerja	Analisis proses dan keterlacakan	Tahapan, peran, dan kebutuhan penguatan

Fokus	Bukti utama	Teknik analisis	Keluaran
Capaian kinerja	Target, realisasi, tren, dan data fiskal	Perbandingan target-realalisasi	Status capaian dan kesenjangan
Enam kriteria Dunn	Dokumen, data indikator, anggaran, dan penilaian ahli	Evaluasi kualitatif	Efektivitas, efisiensi, kecukupan, pemerataan, responsivitas, ketepatan
Faktor strategis	Rekapitulasi 11 ahli dan dokumen	Analisis tematik dan MICMAC	Penggerak, penghubung, bergantung, dan otonom
Rekomendasi	Sintesis seluruh bukti	Integrasi temuan	Prioritas perbaikan berbasis hasil

Sumber: Diolah dari desain penelitian, 2026.



Gambar 1. Tahapan Analisis Penelitian

Sumber: Diolah peneliti berdasarkan prosedur penelitian, 2026.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Objek Penelitian dan Kekuatan Bukti

Objek penelitian mencakup sistem evaluasi RPJMD, bukan hanya dokumen lima tahunan. Sistem tersebut meliputi hubungan rencana dengan dokumen tahunan, dukungan anggaran, pelaksanaan program, pelaporan, pemantauan, evaluasi, dan koreksi kebijakan. Kelembagaan utama melibatkan kepala daerah, Sekretaris Daerah, Bappelitbangda, BPKAD, Inspektorat, perangkat daerah teknis, DPRD, kecamatan, desa, dan masyarakat.

Bukti paling kuat tersedia untuk indikator kemiskinan, Indeks Pembangunan Manusia, pertumbuhan ekonomi, PDRB per kapita, dan realisasi APBD. Bukti untuk demokrasi, konflik, reformasi birokrasi, konektivitas, dan kerukunan belum dapat diverifikasi secara memadai. Kondisi tersebut tidak langsung menunjukkan kegagalan program. Kondisi itu menunjukkan kelemahan dalam definisi, pengukuran, pemutakhiran, dan dokumentasi indikator.

Mekanisme Evaluasi Kinerja RPJMD

Mekanisme formal telah tersedia. RPJMD menetapkan standar. RKPD, Renstra, dan Renja menerjemahkan target. APBD memberi sumber daya. Perangkat daerah melaksanakan kegiatan dan melaporkan keluaran. Bappelitbangda mengumpulkan data serta membahas deviasi. Pimpinan daerah, BPKAD, dan Inspektorat mengarahkan keputusan korektif. Kelemahan utama terdapat pada hubungan antartahap. Evaluasi masih lebih kuat pada keluaran dan serapan daripada hasil serta dampak.

Tabel 2. Penilaian Tahapan Mekanisme Evaluasi RPJMD

Tahap	Temuan	Kebutuhan penguatan
Penetapan standar	Indikator dan target tersedia, tetapi kondisi awal beberapa indikator belum lengkap.	Audit definisi indikator dan penanggung jawab data.
Penjabaran tahunan	Keterlacakan program terhadap indikator belum seragam.	Matriks sasaran-program-anggaran.

Tahap	Temuan	Kebutuhan penguatan
Penganggaran	Serapan dapat ditelusuri, tetapi kontribusi anggaran per indikator belum jelas.	Penandaan anggaran berdasarkan sasaran RPJMD.
Pelaksanaan	Pelaporan lebih kuat pada keluaran daripada hasil.	Penguatan rantai input-output-outcome.
Pemantauan	Ketepatan waktu dan konsistensi data berbeda.	Kalender data dan standar validasi.
Evaluasi	Sebagian indikator belum dapat dinilai.	Status kualitas data dan evaluasi berbasis bukti.
Tindak lanjut	Jejak penyelesaian rekomendasi belum seragam.	Daftar tindak lanjut, penanggung jawab, dan batas waktu.

Sumber: Telaah dokumen, rekapitulasi ahli, dan analisis peneliti, 2026.

Temuan ini menunjukkan bahwa masalah utama bukan ketiadaan prosedur. Masalah terletak pada kualitas keterhubungan. Standar yang baik kehilangan fungsi ketika data tidak tersedia. Data yang baik kehilangan daya koreksi ketika rekomendasi tidak mempunyai penanggung jawab dan tenggat. Pola tersebut mendukung temuan Sukarno et al. (2024) bahwa koordinasi dan penyelarasan tahunan menentukan kualitas implementasi perencanaan daerah.

Target dan Realisasi Indikator

Tabel 3. Target Akhir RPJMD dan Realisasi Tahun 2024

Indikator	Target 2026	Realisasi 2024	Status
Indeks Demokrasi Indonesia	75	Belum tersedia	Belum dapat dinilai
Potensi gangguan atau konflik tertangani	100%	Belum tersedia	Belum dapat dinilai
Indeks Reformasi Birokrasi	65	Belum tersedia	Belum dapat dinilai
Persentase penduduk miskin	4,00%	5,63%	Belum tercapai
Indeks Pembangunan Manusia	67	68,43	Melampaui target
Pertumbuhan ekonomi	13,50%	23,95%	Melampaui target
PDRB per kapita	Rp55,42 juta	Rp79,45 juta	Melampaui target
Indeks Konektivitas Wilayah	65	Belum tersedia	Belum dapat dinilai
Indeks Kerukunan Umat Beragama	70	Belum tersedia	Belum dapat dinilai

Sumber: RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan, BPS Kabupaten Halmahera Selatan, dan dokumen resmi daerah, diolah, 2026.

Tiga indikator telah melampaui target akhir. Hasil tersebut menunjukkan kemajuan pada pembangunan manusia dan aktivitas ekonomi agregat. Kemiskinan belum mencapai target. Perbedaan ini menegaskan bahwa pertumbuhan tinggi belum menjamin distribusi manfaat atau penguatan daya tahan rumah tangga rentan.

Lima indikator yang belum dapat dinilai menimbulkan bias ketersediaan. Sistem evaluasi berisiko hanya menonjolkan indikator yang mudah diukur. Indikator tata kelola, konektivitas, dan kohesi sosial tetap penting karena memengaruhi kemampuan pemerintah menghasilkan dan mendistribusikan manfaat pembangunan.

Evaluasi Berdasarkan Enam Kriteria

Tabel 4. Ringkasan Evaluasi Berdasarkan Kriteria William N. Dunn

Kriteria	Temuan utama	Penilaian
Efektivitas	Indikator manusia dan ekonomi kuat, kemiskinan tertinggal, lima indikator belum dapat dinilai.	Cukup efektif secara parsial
Efisiensi	Serapan fiskal tinggi, tetapi hubungan biaya dengan hasil belum sepenuhnya terlacak.	Cukup efisien secara administratif
Kecukupan	Kemajuan makro belum cukup menutup kemiskinan dan kesenjangan akses.	Belum memadai
Pemerataan	Kondisi kepulauan menciptakan risiko kesenjangan jangkauan dan data terpilah terbatas.	Belum dapat dinilai penuh
Responsivitas	Partisipasi tersedia, tetapi keterlaksanaan usulan menuju anggaran belum kuat.	Cukup responsif secara prosedural
Ketepatan	Kualitas indikator, sasaran, lokasi, dan pemetaan masalah belum seragam.	Belum sepenuhnya tepat

Sumber: Analisis target-realisis, dokumen fiskal, dan rekapitulasi ahli, 2026.

Efektivitas bersifat parsial. Capaian IPM dan ekonomi tidak dapat mewakili seluruh misi. Efisiensi juga belum dapat disimpulkan dari serapan. Kecukupan menjadi masalah karena hasil agregat belum menutup kemiskinan dan kesenjangan akses. Pemerataan belum dapat dinilai penuh akibat keterbatasan data terpilah.

Responsivitas masih dominan prosedural. Forum partisipasi tersedia, tetapi pengaruh usulan terhadap prioritas belum mudah dilacak. Ketepatan dibatasi mutu diagnosis, indikator, dan data. Temuan ini sejalan dengan Sultoni et al. (2024) yang menunjukkan bahwa pencapaian program perlu dibaca bersama biaya, kelompok sasaran, dan waktu pelaksanaan.

Dukungan Fiskal dan Kualitas Belanja

Tabel 5. Realisasi APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024

Komponen	Anggaran setelah perubahan	Realisasi	Capaian
Pendapatan daerah	Rp2.186.514.483.671,00	Rp2.094.849.624.816,37	95,81%
Belanja daerah	Rp2.248.506.173.551,00	Rp2.126.322.495.656,18	94,57%

Sumber: Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2024, diolah, 2026.

Realisasi pendapatan dan belanja menunjukkan kapasitas eksekusi fiskal yang tinggi. Nilai tersebut belum cukup membuktikan efisiensi substantif. Penilaian kualitas belanja memerlukan informasi tentang program prioritas, biaya per keluaran, mutu hasil, lokasi penerima manfaat, dan kontribusi terhadap indikator sasaran.

Kondisi kepulauan meningkatkan biaya objektif pelayanan. Perbandingan biaya perlu mempertimbangkan jarak, cuaca, moda transportasi, dan skala penduduk. Penyesuaian konteks tidak berarti membenarkan pemborosan. Pemerintah tetap perlu membedakan biaya geografis dari kelemahan perencanaan, keterlambatan, duplikasi, dan aset yang tidak berfungsi.

Faktor Pendukung dan Penghambat

Tabel 6. Faktor Pendukung, Penghambat, dan Arah Perbaikan

Faktor	Peran pendukung	Bentuk penghambat	Arah perbaikan
Kualitas data	Dasar penetapan target dan evaluasi.	Data tidak lengkap atau tidak konsisten.	Satu data, metadata, kalender, dan validasi berjenjang.
Kapasitas aparatur	Analisis, indikator, dan pelaporan.	Kemampuan teknis tidak merata.	Pelatihan dan pendampingan terarah.
Koordinasi	Sinkronisasi program lintas urusan.	Ego sektoral dan keterlambatan data.	Forum pengendalian berbasis indikator.
Anggaran	Membiayai program prioritas.	Ruang fiskal terbatas dan perubahan alokasi.	Penandaan anggaran dan perlindungan prioritas.
Komitmen pimpinan	Mendorong disiplin dan tindak lanjut.	Perubahan prioritas dan kepatuhan lemah.	Pengendalian berkala oleh Bupati atau Sekda.
Konsistensi dokumen	Menjaga kesinambungan sasaran dan program.	Program tidak selalu terlacak ke sasaran.	Matriks konsistensi lintas dokumen.
Sistem pemantauan	Mendeteksi deviasi dan koreksi.	Pelaporan cenderung administratif.	Panel kendali dan daftar tindak lanjut.
Wilayah kepulauan	Mendorong inovasi layanan berbasis wilayah.	Biaya tinggi dan jangkauan terbatas.	Perencanaan berbasis pulau dan kecamatan.

Sumber: Sintesis rekapitulasi ahli, telaah dokumen, dan analisis peneliti, 2026.

Setiap faktor mempunyai sifat ganda. Anggaran mendukung program ketika tersedia dan konsisten, tetapi menjadi hambatan ketika berubah tanpa perlindungan prioritas. Regulasi memberi standar, tetapi dapat berhenti pada kepatuhan formal. Data memperkuat keputusan ketika definisinya konsisten, tetapi dapat menyesatkan ketika sumber dan periode berbeda.

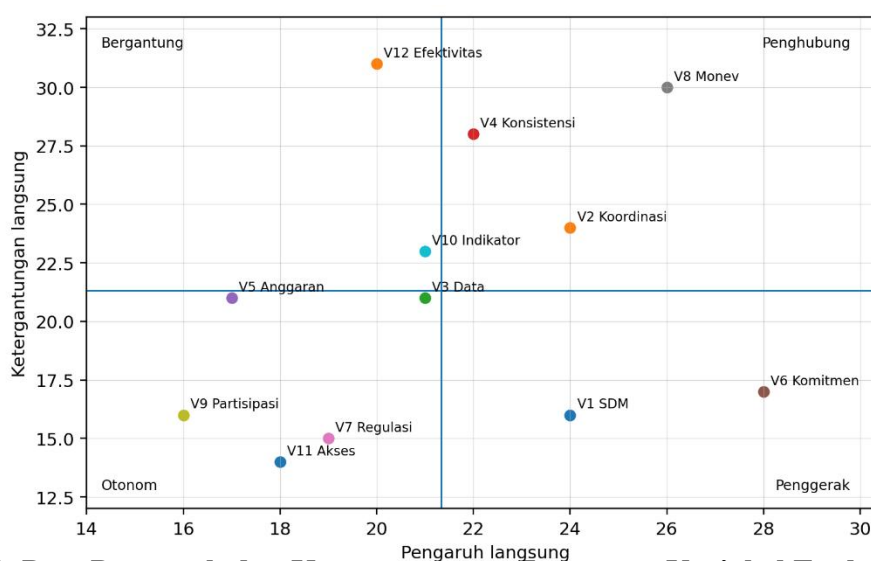
Hasil Analisis MICMAC

Tabel 7. Klasifikasi Variabel Berdasarkan Pengaruh Langsung

Kode	Variabel	Pengaruh	Ketergantungan	Kuadran
V1	Kualitas SDM aparatur perencana	24	16	Penggerak
V2	Koordinasi antarperangkat daerah	24	24	Penghubung
V3	Kualitas data pembangunan	21	21	Otonom
V4	Konsistensi perencanaan-penganggaran	22	28	Penghubung

Kode	Variabel	Pengaruh	Ketergantungan	Kuadran
V5	Ketersediaan anggaran pembangunan	17	21	Otonom
V6	Komitmen kepala daerah dan pimpinan OPD	28	17	Penggerak
V7	Dukungan regulasi	19	15	Otonom
V8	Sistem pemantauan dan evaluasi	26	30	Penghubung
V9	Partisipasi masyarakat	16	16	Otonom
V10	Kualitas indikator kinerja RPJMD	21	23	Bergantung
V11	Aksesibilitas wilayah kepulauan	18	14	Otonom
V12	Efektivitas program OPD	20	31	Bergantung

Sumber: Laporan MICMAC Evaluasi Kinerja RPJMD Halmahera Selatan, diolah, 2026.



Gambar 2. Peta Pengaruh dan Ketergantungan Langsung Variabel Evaluasi RPJMD

Sumber: Diolah dari nilai pengaruh dan ketergantungan langsung MICMAC, 2026.

Komitmen pimpinan dan kualitas SDM aparatur menjadi variabel penggerak. Keduanya mempunyai pengaruh tinggi dan ketergantungan relatif rendah. Perbaikan pada dua unsur ini dapat memengaruhi data, indikator, koordinasi, konsistensi, pemantauan, dan efektivitas program. Kepemimpinan diperlukan untuk menetapkan arah dan menyelesaikan hambatan lintas organisasi. Aparatur diperlukan untuk menerjemahkan arah menjadi indikator, analisis, dan tindakan.

Koordinasi, konsistensi perencanaan-penganggaran, dan sistem pemantauan-evaluasi menjadi variabel penghubung. Ketiganya sangat penting dan sensitif. Perubahan pada satu unsur dapat menyebar ke seluruh sistem. Sistem pemantauan memiliki ketergantungan tinggi karena membutuhkan data, indikator, kapasitas, anggaran, dan kepatuhan perangkat daerah.

Kualitas indikator dan efektivitas program berada pada kelompok bergantung dalam analisis langsung. Posisi ini menjelaskan bahwa efektivitas tidak dapat diperbaiki hanya dengan menambah target atau kegiatan. Efektivitas merupakan hasil dari kepemimpinan, kapasitas, koordinasi, konsistensi, data, dan pemantauan yang bekerja bersama.

Analisis tidak langsung mengubah posisi kualitas data dan kualitas indikator menjadi variabel penghubung. Temuan ini penting. Data dan indikator menyalurkan pengaruh kepemimpinan serta kapasitas menuju keputusan program dan anggaran. Kualitas data yang lemah dapat memutus seluruh rantai evaluasi meskipun prosedur formal tersedia.

Matriks mencapai stabilitas pada iterasi ketiga dan keempat dengan tingkat keterisian 91,67 persen. Kepadatan hubungan menunjukkan bahwa masalah evaluasi bersifat sistemik. Pemerintah tidak cukup memperbaiki satu aplikasi, satu laporan, atau satu perangkat daerah. Perbaikan harus dimulai dari penggerak dan dilanjutkan melalui variabel penghubung.

Pemetaan Aktor dan Implikasi Kebijakan

Tabel 8. Peringkat Aktor dalam Sistem Evaluasi RPJMD

Aktor	Skor	Peran utama
Kepala Daerah atau Sekda	31	Kepemimpinan, koordinasi, konsistensi prioritas, dan keputusan tindak lanjut.
Bappelitbangda atau Bapperida	29	Perencanaan, data, indikator, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi.
OPD teknis pelaksana	28	Pelaksanaan program, keluaran, hasil, dan pelaporan.
Inspektorat	24	Pengawasan, kepatuhan, validasi, dan akuntabilitas.
BPKAD atau TAPD	23	Penganggaran, kemampuan fiskal, dan konsistensi alokasi.
DPRD	23	Regulasi, anggaran, dan pengawasan.
Kecamatan atau desa	20	Data wilayah, koordinasi lapangan, dan jangkauan layanan.
Masyarakat atau forum Musrenbang	13	Aspirasi, validasi kebutuhan, dan pengawasan sosial.

Sumber: Pemetaan tugas kelembagaan terhadap 12 variabel MICMAC, diolah, 2026.

Peta aktor menegaskan bahwa perubahan membutuhkan kepemimpinan politik dan kapasitas teknokratis secara bersamaan. Kepala daerah dan Sekretaris Daerah memiliki kewenangan lintas organisasi. Bappelitbangda memiliki fungsi analitis dan koordinatif. OPD teknis mengubah rencana menjadi layanan serta hasil. Inspektorat dan BPKAD menjaga pengawasan serta dukungan fiskal.

Posisi formal masyarakat lebih rendah karena kewenangannya terbatas, bukan karena kebutuhannya kurang penting. Pemerintah perlu meningkatkan keterlacakan usulan Musrenbang, alasan penerimaan atau penolakan, dan penilaian masyarakat terhadap hasil. Andi et al. (2025) menunjukkan bahwa peningkatan jumlah usulan belum menjamin partisipasi substantif apabila ruang keputusan telah dibatasi sebelumnya.

Hasil keseluruhan menunjukkan keberhasilan parsial. Pembangunan manusia, aktivitas ekonomi, dan eksekusi fiskal menunjukkan kemajuan. Kemiskinan, pemerataan layanan, kualitas data, konsistensi indikator, serta fungsi korektif evaluasi masih menjadi kelemahan. Kategori parsial lebih tepat daripada label berhasil atau gagal karena data memperlihatkan kemajuan dan kesenjangan secara bersamaan.

Prioritas pertama adalah audit indikator. Setiap indikator perlu memiliki kondisi awal, definisi, arah kinerja, rumus, sumber, jadwal pemutakhiran, tingkat keterpilahan, dan penanggung jawab. Prioritas kedua adalah penandaan anggaran berdasarkan sasaran RPJMD. Penandaan tersebut memungkinkan pemerintah menilai berapa sumber daya yang mendukung setiap hasil.

Prioritas ketiga adalah pengendalian tindak lanjut. Setiap rekomendasi perlu mencantumkan masalah, keputusan, penanggung jawab, tenggat, kebutuhan anggaran, dan status penyelesaian. Prioritas keempat adalah evaluasi berbasis wilayah. Data perlu dipilah menurut kecamatan, gugus pulau, kelompok sosial, dan akses layanan. Pendekatan ini penting agar pertumbuhan agregat tidak menutupi ketertinggalan lokal.

Prioritas kelima adalah penguatan aparatur. Pelatihan perlu berfokus pada perancangan indikator, analisis data, evaluasi biaya-hasil, penganggaran berbasis kinerja, pemetaan spasial, dan pengelolaan risiko. Prioritas keenam adalah memperkuat kolaborasi. Forum pengendalian harus melibatkan Bappelitbangda, OPD, BPKAD, Inspektorat, DPRD, kecamatan, desa, dan unsur masyarakat sesuai perannya.

Penelitian memiliki batas. Data realisasi yang digunakan terutama sampai tahun 2024. Lima indikator belum dapat dinilai. Rekapitulasi primer berasal dari 11 ahli dan tidak memuat transkrip verbatim dalam berkas. Hasil tidak dapat diposisikan sebagai penilaian akhir seluruh periode. Batas ini justru menegaskan kebutuhan evaluasi lanjutan setelah data 2025 dan 2026 tersedia.

KESIMPULAN

Mekanisme evaluasi kinerja RPJMD Kabupaten Halmahera Selatan telah tersedia melalui hubungan dokumen perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, pemantauan, dan tindak lanjut. Pelaksanaannya belum optimal karena keterlacakan indikator, program, anggaran, verifikasi data, dan penyelesaian rekomendasi belum seragam. Evaluasi masih cenderung lebih kuat sebagai pemenuhan administrasi daripada instrumen pembelajaran dan koreksi kebijakan.

Penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan tergolong cukup berhasil secara parsial. IPM, pertumbuhan ekonomi, dan PDRB per kapita menunjukkan capaian kuat. Kemiskinan belum mencapai target. Pemerataan layanan antarpulau belum dapat dinilai penuh. Beberapa indikator strategis juga belum memiliki data yang memadai. Serapan fiskal tinggi menunjukkan kemampuan eksekusi, tetapi belum otomatis membuktikan kualitas hasil dan distribusi manfaat.

Analisis MICMAC menempatkan komitmen pimpinan dan kualitas aparatur sebagai variabel penggerak. Koordinasi, konsistensi perencanaan-penganggaran, dan sistem pemantauan-evaluasi menjadi variabel penghubung. Kualitas data serta indikator menguat sebagai penghubung ketika pengaruh tidak langsung dihitung. Efektivitas program menjadi hasil dari bekerjanya seluruh sistem.

Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan perlu melakukan audit indikator, memperkuat satu data pembangunan, menerapkan penandaan anggaran berdasarkan sasaran RPJMD, dan membangun matriks tindak lanjut yang memiliki penanggung jawab serta batas waktu. Koreksi kebijakan perlu dipusatkan pada pengurangan kemiskinan, pemerataan layanan antarpulau, peningkatan konektivitas, dan penguatan ekonomi lokal. Evaluasi akhir perlu dilakukan setelah data 2025 dan 2026 tersedia dengan dukungan data spasial, wawancara terverifikasi, dan pengukuran manfaat pada tingkat masyarakat.

DAFTAR REFERENSI

- Ahmed, S. K. (2024). The pillars of trustworthiness in qualitative research. *Journal of Medicine, Surgery, and Public Health*, 2, 100051. <https://doi.org/10.1016/j.glmedi.2024.100051>
- Andi, A. R. N. H., Ardiansyah, F., et al. (2025). A critical assessment of public participation in Makassar's development planning. *Tamalanrea: Journal of Governance and Development*.
- Auliansyah, R. (2024). Economic implications of implementing the bureaucratic reform roadmap in the regional medium-term development plan: A strategic effort to enhance public service. *Kemakmuran Hijau: Jurnal Ekonomi Pembangunan*.
- Bachtiar, S. (2022). Sustainable development in the Tasikmalaya regional apparatus organization. *Journal of Economics and Business*, 3(1).
- Braun, V., & Clarke, V. (2022). *Thematic analysis: A practical guide*. SAGE Publications.
- Byrne, D. (2022). A worked example of Braun and Clarke's approach to reflexive thematic analysis. *Quality & Quantity*, 56, 1391-1412. <https://doi.org/10.1007/s11135-021-01182-y>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2023). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (6th ed.). SAGE Publications.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Ginting, M. D., Fariyanti, A., & Pravitasari, A. E. (2024). Strategy to improve consistency of planning and budgeting in the Public Works and Spatial Planning Department of Palembang City. *Jurnal Ekonomi*.
- Hennink, M., & Kaiser, B. N. (2022). Sample sizes for saturation in qualitative research: A systematic review of empirical tests. *Social Science & Medicine*, 292, 114523. <https://doi.org/10.1016/j.socscimed.2021.114523>
- Kamaru, I. (2025). Operational capacity on policy capacity in the development of regional potential of South Bolaang Mongondow Regency. *KnE Social Sciences*.
- Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia. (2017). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah*.
- Khaerah, N., Fatmawati, F., Hawing, H., et al. (2025). Strategic co-creation and synergistic partnerships in digital budgeting reform: Strengthening public governance for sustainable cities in Makassar, Indonesia. *Frontiers in Sustainable Cities*, 7, 1716088. <https://doi.org/10.3389/frsc.2025.1716088>
- Naeem, M., Ozuem, W., Howell, K., & Ranfagni, S. (2023). A step-by-step process of thematic analysis to develop a conceptual model in qualitative research. *International Journal of Qualitative Methods*, 22. <https://doi.org/10.1177/16094069231205789>
- Nenobais, H., Virginiawan, V., & Rahmadi, M. H. (2025). Evaluation of development planning policy in Anambas Islands Regency. *International Conference on Community Development*.
- Nurlaela, E., Asni, M., Putri, A. R., & Garis, R. R. (2024). Evaluation of the performance of the Regional Medium Term Development Plan for the 2023 period by Bappeda Ciamis. *Jurnal Dialektika: Jurnal Ilmu Sosial*.
- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. (2021). *Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 19 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2021-2026*.
- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. (2025a). *Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 2024*.

-
- Pemerintah Kabupaten Halmahera Selatan. (2025b). Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun Anggaran 2024.
- Rahayu, M. J., Juwita, A. H., & Bintariningtyas, S. (2024). The effectiveness of the regional long-term development plan of Purworejo Regency: The evaluation of strategic planning. *Planning Malaysia*.
- Siregar, M. I., Adam, A., & Isnaini, I. (2022). Analisis kinerja Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Padang Lawas Utara tahun 2019-2023. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences*.
- Sukarno, M. S., Riadi, S., & Kurnia, I. (2024). Implementation of regional development planning policies at the Regional Development Planning Agency of Central Sulawesi Province: Study on the preparation of the 2024 RKPD. *Journal of Law, Public Administration and Social Science*.
- Sultoni, M. R., Anggraeni, M. R., Shafira, K., Hermawan, D., & Ramdani, F. T. (2024). Evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah tahun 2019-2024 di Sekretariat DPRD Kota Bogor. *Karimah Tauhid*.
- Suyanto, S., Krisprimandoyo, D. A., Jusnita, R. A. E., Bernardus, D., & Riyadi, S. (2023). Sustainable development planning of Surabaya City: Pursuing inclusive and sustainable growth. *Journal of Business and Management Review*.
- Tarore, S. V., Dilapanga, A. R., Azizah, U. U., & Bulu, L. (2023). Analysis of the preparation of the Regional Medium-Term Development Plan of Minahasa Regency for the 2018-2023 period. *Technium Social Sciences Journal*, 49.
- Wijayanti, A. T., Mamonto, F., & Bulu, L. (2025). Conformity of planning and budgeting documents for regional government budgets at the Regional Research and Development Planning Agency of Kotamobagu City. *Technium Social Sciences Journal*.